

Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Terhadap Opini Laporan Keuangan

Risna Juniati

Universitas Bina Darma Palembang, risna.juniati03@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan penyelesaian tindak lanjut temuan terhadap opini laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan penyelesaian tindak lanjut temuan terhadap opini laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisisioner kepada 57 orang pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai responden yang menjadi sampel Penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap opini laporan keuangan, Penyelesaian tindak lanjut temuan memiliki pengaruh terhadap opini audit dan secara simultan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan penyelesaian tindak lanjut temuan memiliki pengaruh terhadap opini laporan keuangan.

Kata Kunci : Kapabilitas, tindak lanjut temuan, opini

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the Effect of Capability of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and the completion of follow-up findings on financial statement opinions. This study aims to determine the effect of the capability of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and the completion of follow-up findings on financial statement opinion. This study uses primary data by distributing questionnaires to 57 people at the Regional Inspectorate Office of South Sumatra Province as respondents who become the research sample. The analytical method used in this research is multiple regression analysis. The results show that the capability of the Government Internal Supervisory Apparatus has no influence on the opinion of the financial statements, the settlement of follow-up findings has an influence on the audit opinion and simultaneously the capability of the Government Internal Supervisory Apparatus and the settlement of actions. Further findings have an influence on the opinion of financial statements.

Keywords: capability; follow-up findings; opinion

A. PENDAHULUAN

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Publik bisa mengetahui serta mendapatkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya apakah telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pengungkapan informasi keuangan yang transparan, tentunya menjadi bahan penilaian bagi publik bahwa pengelolaan keuangan telah diselenggarakan secara baik dan benar.

Bentuk dari pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah daerah adalah dengan menyusun laporan keuangan, dimana laporan tersebut harus disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir disetiap tahunnya. Setelah laporan keuangan di terima, Tim Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan



pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, tim Badan Pemeriksa Keuangan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan di terima. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk menilai tingkat kewajaran penyajian informasi keuangan pada suatu pemerintah daerah.

Ada beberapa pihak yang berkepentingan dan membutuhkan opini audit ini yang pertama adalah Pihak eksternal dalam hal ini adalah DPRD, masyarakat dan investor yang menggunakan Laporan Audit untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pada entitas Pemerintah dan sebagai tolok ukur untuk menilai suatu kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Kedua Pihak Auditor dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menggunakan opini audit sebagai sarana untuk menilai amanat profesional dan perundang-undangan dan Pihak Ketiga dalam hal ini Pemerintah yang menggunakan opini untuk menciptakan reputasi di mata publik atas kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan.

Namun hasil Opini audit menjadi hal yang menarik untuk dicermati dimana ditemui masih ada pemerintah daerah yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun tingkat penyelewengan dan korupsinya tinggi, padahal pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu memang ditemukan banyak penyimpangan-penyimpangan pada saat dilakukan audit laporan keuangan sehingga mempengaruhi pencapaian opininya dengan semakin banyak pelanggaran yang ada, maka opini yang diberikan juga akan semakin buruk.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan impian seluruh institusi baik di pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi dapat mengekspresikan akuntabilitasnya kepada para stakeholdernya (Publik). Dengan diperolehnya opini WTP tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, mencegah penyalagunaan anggaran dan dapat meminimalisir tindak pidana korupsi.

Penyebab belum diperolehnya opini WTP antara lain dikarenakan kesalahan penganggaran, pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat dan bentuk pertanggungjawaban yang salah, aset yang tidak tertib, lemahnya sistem pengendalian intern dan penyimpangan pada peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia khususnya yang mengelola keuangan daerah dan akuntansi yang rendah, serta kurang optimalnya review laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat sehingga masih banyak temuan yang dihasilkan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain memberikan Opini audit atas Laporan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga memberikan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui entitas Perangkat Daerah yang mendapat temuan sebagai umpan balik bagi Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kinerja apalagi temuan yang bersifat kerugian daerah /Negara harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan Negara/Daerah adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui intensifikasi dan efektifitas peranan APIP. Untuk meningkatkan peranan APIP tersebut harus memiliki tingkat Kapabilitas yang baik sehingga mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. Peningkatan kapabilitas Aparat Pemerintah Internal Pemerintah merupakan usaha untuk memperkuat dan



meningkatkan struktur kelembagaan, manajemen, proses bisnis dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pemerintah Internal Pemerintah (APIP) agar mampu menjalankan peran serta fungsinya secara efektif .

Salah satu tugas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan pemeriksaan secara berkala pada perangkat daerah di tahun berjalan sehingga sudah dapat diketahui dan pencegahan apabila ditemukan ada penyimpangan dan melakukan revidu terhadap laporan keuangan. Hasil revidu harus ditindaklanjuti oleh perangkat sebelum laporan keuangan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tim Pemeriksa BPK akan memanfaatkan hasil revidu yang dilakukan oleh APIP sehingga akan meminimalisir terjadinya suatu temuan/kesalahan oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan akan mempengaruhi pemberian opini atas laporan keuangan.

Pemberian opini tidak hanya berdasarkan transparansi dan akuntabilitas saja, namun ada elemen lain yang terkait yaitu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pasal 23 E ayat (2) dan (3) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1), dimana kedua undang-undang ini mengamanatkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan harus ditindaklanjuti oleh setiap entitas yang mendapat temuan dan opini yang diberikan menjadi acuan untuk perbaikan ditahun berikutnya.

Penyelesaian tindak lanjut menjadi mutlak harus dilakukan sebagai bentuk feedback atas pelaksanaan audit sebagai langkah awal dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Diharapkan dengan semakin sedikit temuan yang diaudit oleh BPK maka semakin besarliah peluang untuk mendapatkan opini WTP.

B. KAJIAN TEORI

1) Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa pihak yang menjalankan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP terdiri dari Badan Pengawasan dan Keuangan Pemerintah (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. APIP sebagai unsur pengawasan mempunyai tugas untuk melaksanakan Audit, Revidu, Evaluasi, dan Kegiatan Pengawasan lainnya yaitu Kegiatan Pemantauan, Konsultansi, dan pendampingan. APIP harus dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi dengan memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perkembangan audit sektor publik di dunia, Organisasi profesi Auditor intern dunia telah mengembangkan Internal Audit Capability Model (IACM.) IACM adalah suatu Kerangka kerja yang disiapkan oleh tim research IIA dan dipublikasikan pada tahun 2010 yang diadopsi oleh BPKP dalam rangka menyusun Peraturan Kepala BPKP pada tahun 2011. Pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015-2019. Di samping itu, diterbitkan juga Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis



Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Rerangka model yang dibangun ada lima tingkatan (level) yaitu : (1) *Initial*, (2) *Infrastructure*, (3) *Integrated*, (4) *Managed* dan (5) *Optimizing*.

Salah satu elemen penilaian dalam Internal Audit Capability Model (IACM) adalah Pengelolaan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi auditor dengan pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pengalaman kerja di dalam penugasan dan setiap auditor wajib untuk mengikuti jenjang/qualifikasi auditor secara Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*). Peningkatan kompetensi auditor sangat berpengaruh untuk menjaga mutu audit yang dilaksanakan oleh auditor. Auditor yang kompeten dan professional tentunya akan menilai tingkat keefisienan, keefektifan dan ekonomis serta dapat memberikan sumbang saran perbaikan pada organisasi perangkat daerah.

2) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern.Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai, di samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.

Hasil kinerja APIP dalam pelaksanaan pengawasan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit atau Pemeriksaan (LHA/P). Laporan tersebut disampaikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti. Penyelesaian tindak lanjut beserta bukti tindak lanjut atas temuan pemeriksaan, disampaikan auditi kepada APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sedangkan status tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan dilakukan oleh APIP berdasarkan data/bukti penyelesaian oleh auditi. Status tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan dilakukan berdasarkan perkembangan penyelesaian sebagai yaitu: *selesai*, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh auditi dengan bukti-bukti yang sah dan telah dinyatakan selesai oleh APIP; *dalam proses*, apabila saran/rekomendasi sedang dalam proses penyelesaian, akan tetapi belum semua rekomendasi dipenuhi oleh auditi;*belum ditindaklanjuti*; apabila saran/rekomendasi belum ditindaklanjuti seluruhnya sesuai dengan saran/rekomendasi APIP; dan *tidak dapat ditindaklanjuti*; apabila saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

3) Opini atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pentingnya pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang independen dikarenakan informasi dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan. Selain itu para pengguna

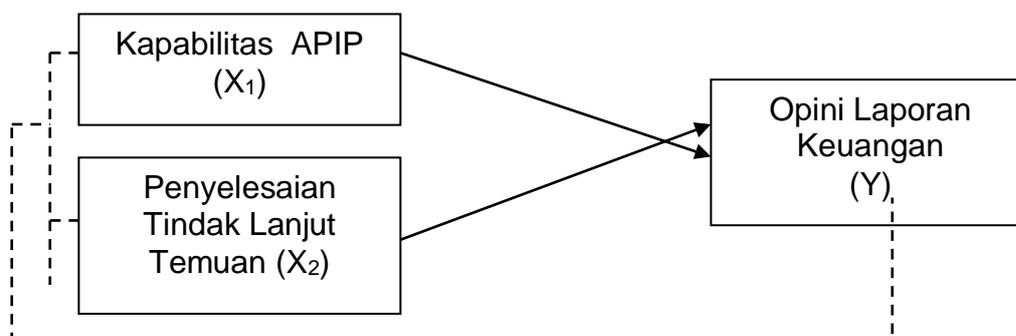


laporan keuangan memerlukan pihak yang independen tersebut untuk mendapatkan penjelasan tentang kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan standar akuntansi; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Kerangka Pikir dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini akan menguji masing – masing variabel yaitu Kapabilitas APIP (X_1) dan Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK (X_2) berpengaruh terhadap Opini Laporan keuangan (Y), dan kedua variabel yaitu (X_1 dan X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini laporan keuangan (Y). sebagaimana dituangkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar Kerangka Pikir

Keterangan:

—————> Secara Parsial
-----> Secara simultan

5) Hubungan Kapabilitas APIP terhadap opini laporan keuangan

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang mencakup kapasitas, kewenangan, kompetensi SDM yang saling berkaitan dan harus dimiliki oleh APIP. Tingkat Kapabilitas APIP yang semakin tinggi dari level 1 ke level 3 sesuai dengan target RPJMD 2015-2019 akan membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel sehingga akan menjadikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi pertimbangan bagi BPK dalam memberikan opininya, dimana Pemberian opini ini bergantung pada kualitas laporannya. Peranan APIP di dalam pengawasan diharapkan mampu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pengawasan yang dilakukan oleh APIP melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan diantaranya ialah pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan aset, reviu laporan keuangan, reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta evaluasi sistem pengendalian internal.



Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_1 = Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap opini laporan keuangan

6) Hubungan Penyelesaian Tindak lanjut temuan terhadap opini laporan keuangan

Laporan Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan memuat temuan dan rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan mutlak harus dilakukan oleh pihak-pihak yang diaudit dan menerima temuan sesuai dengan rekomendasi yang dimuat di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan. Semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang ditindaklanjuti diharapkan akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di tahun berikutnya hal ini dapat ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK pada periode berikutnya dan akan menjadi pertimbangan bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan opininya..

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka hipotesis dalam penelitian adalah :

H_2 = Pengaruh Penyelesaian Tindak lanjut Temuan terhadap Opini Laporan Keuangan.

7) Hubungan Kapabilitas APIP dan Penyelesaian Tindak lanjut temuan terhadap opini laporan keuangan

Peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan pengawalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan APBD. APIP melakukan revidi atas laporan keuangan, APIP yang kompeten akan menghasilkan hasil audit yang baik. Selain melakukan revidi APIP juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut temuan BPK, semakin banyak temuan yang ditindak lanjuti maka akan menjadi pertimbangan bagi BPK untuk memberikan pendapatnya.

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka hipotesis dalam penelitian adalah :

H_{30} = Pengaruh Kapabilitas APIP dan penyelesaian tindak lanjut temuan secara bersama-sama terhadap opini laporan keuangan

C. METODE PENELITIAN

1) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui kuisisioner (daftar Pertanyaan) yang diberikan kepada responden yang telah ditentukan oleh peneliti..

2) Populasi dan sampel

Populasi dan sampel yang ditentukan adalah APIP yang berada pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 57 orang.

3) Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan menggunakan metode analisis deskriptif



kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda.

D. HASIL PENELITIAN

1. Uji Kualitas Data

a) Pengujian Validitas

Penelitian ini melakukan uji Validitas atas pertanyaan-pertanyaan pada kuisioner yang di sebarakan kepada 57 responden, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Item	Rata-rata skor	R. Tabel	Keterangan
Kapabilitas APIP	16	0,590	0,329	Valid
Penyelesaian Tindak Lanjut	8	0,612	0,329	Valid
<i>Opini Audit</i>	4	0,821	0,329	Valid

Sumber: Data Olahan, 2021

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan melihat koefisien α Cronbach. Ringkasan hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's α Hitung	Cronbach's α Tabel	Keterangan
Kapabilitas APIP	16	0,749	0,60	Valid
Penyelesaian Tindak Lanjut	8	0,740	0,60	Valid
Opini Audit	4	0,824	0,60	Valid

Sumber: Data Olahan, 2021

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3.568	5.062			.705	.484
	x1	-.083	.090	-.141		-.923	.360
	x2	.523	.144	.556		3.632	.001

Dependent Variable: y

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel Diatas menunjukkan koefisien β merupakan bentuk sebuah persamaan regresi yang dapat dihasilkan sebagai berikut:

$$Y = 3,568 - 0,83 X_1 + 0,523 X_2 + e$$

Dari persamaan diatas maka, menunjukkan bahwa konstanta sebesar 3,568



Berdasarkan hasil analisis tersebut dinyatakan sebagai berikut :

1. jika Kapabilitas APIP dan Penyelesaian Tindak lanjut bernilai 0 maka koefisien opini audit menjadi 3,568
2. Jika Kapabilitas APIP naik satu satuan, maka opini audit akan turun sebesar 0,83
3. Jika Penyelesaian tindak lanjut naik satu satuan, maka opini audit akan naik sebesar 0,523

a) Pengujian Hipotesis

Tabel Hasil Pengujian Uji T

No	Variabel	T	T Tabel	Keterangan
1.	Kapabilitas	0,923	2.0048	Tidak
2.	Penyelesaian tindak Lanjut	3,632	2.0048	Berpengaruh Berpengaruh

Sumber: Data Olahan 2021

Tabel Hasil Pengujian Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F Hitung	F. Tabel	Keterangan
1	Regression	157.227	2	78.614	8.099	3,16	Berpengaruh
	Residual	524.141	54	9.706			
	Total	681.368	56				

Sumber: Data Olahan 2021

b) Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.480 ^a	.231	.202	3.115

Sumber: Data Olahan 2021

E. PEMBAHASAN

1) Pengaruh Kapabilitas APIP Terhadap Opini laporan keuangan

Hasil Pengujian menunjukkan Kapabilitas APIP tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai T Tabel dari nilai T Hitung. Hal ini disebabkan oleh kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang mencakup kapasitas, kewenangan, kompetensi SDM APIP yang antara satu dengan yang lain saling terkait dan harus dimiliki oleh APIP dalam mewujudkan peran APIP yang efektif (Perka BPKP, Per-1633/K/JF/2011).

Adanya keterbatasan jumlah aparat Inspektorat, tingkat kompetensi dan luasnya daerah cakupan pemeriksaan masih menjadi kendala untuk dapat memeriksa seluruh pos keuangan secara cermat dan mendetail, sehingga kinerja audit intern menjadi kurang optimal.



2) Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Laporan Keuangan

Hasil pengujian ini menunjukkan penyelesaian tindak lanjut temuan memiliki pengaruh terhadap opini audit. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai T hitung dari nilai T tabel. Hasil pengujian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Aryani (2016) yang mengungkapkan bahwa Penyelesaian Tindak lanjut temuan dan rekomendasi dilaksanakan untuk meningkatkan opini audit yang baik pada pemerintahan sehingga dapat menjalankan good governance pemerintah daerah. Menurut Sari (2013), prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dipengaruhi adanya tindak lanjut rekomendasi audit BPK, SPI, dan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah.

Hal ini dapat menggambarkan bahwa banyaknya atau besarnya penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh APIP akan meningkatkan nilai positif terhadap opini audit pada pemerintah daerah. Penyelesaian tindak lanjut ini harus memiliki tingkat ketepatan waktu dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan dan melakukan pelayanan *door to door* pada perangkat daerah yang mendapatkan temuan berjalan dengan baik.

3) Pengaruh Kapabilitas APIP dan Penyelesaian Tindak lanjut Terhadap Opini Laporan Keuangan

Berdasarkan pada hasil pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) yang dimana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1 dan X2) secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), dimana diperoleh nilai F hitung lebih besar dari nilai F Tabel.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Hasil Penelitian menunjukkan Kapabilitas APIP tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit dan penyelesaian tindak lanjut berpengaruh terhadap Opini Audit. Tidak berpengaruhnya Kapabilitas APIP disebabkan karena keterbatasan jumlah APIP, kompetensi yang dimiliki oleh APIP serta luasnya cakupan pemeriksaan menjadi kendala untuk dapat memeriksa seluruh pos keuangan secara cermat dan detail sehingga kinerja audit menjadi kurang optimal.

Uji Koefisien determasi (Adjusted R²) menunjukkan bahwa variabel yang dipakai peneliti yaitu Kapabilitas APIP dan Penyelesaian tindak lanjut mampu menjelaskan keberadaan variabel opini audit sebesar (20,2%) dan sisanya dipengaruhi variabel independen lainnya sebesar 79,8%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Nilai koefisien Determinasi (R²) pada penelitian ini adalah 0,202 hal ini menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP dan Penyelesaian Tindak lanjut dapat menjelaskan opini audit sebesar 20,2% dan sisanya sebesar 79,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

2) Saran

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah responden APIP yang berada pada Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, disarankan untuk penelitian berikutnya untuk menambah jumlah sampel dari Perangkat Daerah yang terlibat langsung dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 2 variabel independen, sehingga cakupan



panelitian tidak dapat meluas untuk mengetahui faktor-faktor lainnya yang memberikan pengaruh terhadap pemberian opini audit oleh BPK RI atas Laporan Keuangan. Untuk kedepannya diharapkan ada penelitian yang dapat menambahkan variabel lain dan menggunakan data yang lebih update sehingga menghasilkan pengujian yang lebih berkualitas serta memperluas cakupan solusi bagi Pemerintah Daerah dalam mendapatkan opini audit yang lebih baik lagi di tahun berikutnya.

Disarankan agar Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan Quality Assurance (QA) dalam meningkatkan level Kapabilitas APIP di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dengan semakin meningkatkan nilai Kapabilitas APIP maka akan mempengaruhi kinerja APIP dalam bidang pengawasan serta melakukan pemantauan tindak lanjut temuan BPK secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Pramita Sari, 2015 “Pengaruh Temuan Audit, Tindak lanjut dan kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan”
- Ristu Pratiwi.2016, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak lanjut temuan terhadap Opini”. Jurnal Akuntansi 2016, ecojoin.org
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang “Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara” Jakarta : 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”, Jakarta : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP 2015 – 2019

